

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Pendapat dari Mardiasmo (2002:132):

“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Jadi Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan menggali sumber-sumber dana di wilayahnya sendiri untuk meningkatkan penerimaan daerah kemudian dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000:

“Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi/Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.”

PAD yang bersumber dari pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77):

- a) Pajak hotel
- b) Paja restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

Dalam Undang-Undang Republika Indonesia No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tarif jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 5%
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 10%

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di Bawah Tanah dan Air di Permukaan 20 %
- e) Pajak Hotel 10 %
- f) Pajak Restoran 10%
- g) Pajak Hiburan 35%
- h) Pajak Reklame 25%
- i) Pajak Penerangan Jalan 10%
- j) Pajak Parkir 20%

Pajak Daerah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) untuk mengisi kas daerah guna membiayai pengeluaran daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, pajak daerah berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) dalam artian untuk mengatur perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Handayani, 2012).

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat diartikan sebagai iuran/pembayaran kepada daerah atas jasa tertentu atau izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembayar retribusi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001:

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah (Pudyatmoko, 2006 dalam Dewi, 2013):

- a) Dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan dan pelaksanaannya yang berlaku umum.
- b) Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar.
- c) Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- d) Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Retribusi dapat dikelompokkan menjadi dua (Dewi, 2013):

- a) Retribusi jasa umum, yaitu: retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi jasa usaha, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 2 sebagai berikut:

- a) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- (5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (6) Retribusi Pasar;
- (7) Retribusi Air Bersih;
- (8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

a) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

b) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- (2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - (3) Retribusi Terminal;
 - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - (5) Retribusi Tempat Penitipan Anak;
 - (6) Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa;
 - (7) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - (8) Retribusi Rumah Potongan Hewan;
 - (9) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
 - (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - (11) Retribusi Penyeberangan di atas Air;
 - (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Laba deviden dan penjualan saham milik daerah merupakan contoh jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah
- Menurut Dewi (2002) dalam Davey bahwa penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Yang paling ditekankan yaitu bahwa potensi di suatu daerah akan menentukan sumber penerimaan daerah yang akan diterima.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut Dewi (2002) dalam Davey adalah:

- a) Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan.
- b) Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Jika retribusi selalu meningkat maka akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah (Pleanggra, 2012).

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, yaitu “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.”

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan bersifat sementara dan dilakukan secara sukarela untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 3) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

- 4) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 5) Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.

Dari definisi diatas maka pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan seseorang ke suatu tempat dengan menikmati perjalanannya untuk mendapatkan suasana nyaman, yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun pengusaha sehingga dapat menghilangkan penat, menikmati keindahan alam/buatan tersebut, dan dapat bersenang-senang untuk sementara waktu.

b. Jenis-jenis Pariwisata

James J, Spillane (1987:28-31) dalam Qadarrochman (2010) membagi jenis pariwisata sebagai berikut:

- 1) Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*).
Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.
- 2) Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*).
Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan

sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

3) Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*).

Pariwisata untuk urusan usaha dagang dilakukan oleh pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

4) Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*).

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

5) Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*).

Pariwisata untuk kebudayaan merupakan serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

6) Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).

Pariwisata untuk rekreasi digunakan di hari libur untuk beristirahat, meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan.

c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dalam Pleanggra (2012) tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

- 1) hasil pajak daerah,
 - 2) hasil retribusi daerah,
 - 3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang asli

Sektor pariwisata bukan industri prioritas dalam meningkatkan pendapatan daerah, namun sektor pariwisata berpotensi menjadi industri pendukung dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemandirian (Saputro, 2015). Dari studi yang dilakukan oleh Saputro (2015) PAD Jawa Tengah meningkat dengan tingginya kontribusi dari sektor pariwisata dalam menghasilkan pendapatan daerah, sehingga sektor wisata dianggap memiliki peranan penting bagi PAD Jawa Tengah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata

Dari banyaknya jenis pariwisata di Indonesia yang dijelaskan diatas dapat menjadi sumber Penerimaan Daerah termasuk bagi Penerimaan Daerah Kabupaten Magetan, yang dapat diperoleh dari obyek wisata, souvenir yang dibeli wisatawan, banyaknya hotel/penginapan, restoran, travel agen dan tour guide, berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba

BUMD, pajak, dan bukan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan dari Sektor Pariwisata antara lain:

a. Jumlah wisatawan

Wisatawan yaitu orang-orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk pergi ke tempat lain dengan menikmati perjalanan selama melakukan kunjungan (Gitapati, 2012).

Menurut Yoeti (2008) dalam Qadarrochman (2010) kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara menjadi sumber penerimaan daerah dan negara, disamping dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah wisata, wisatawan mancanegara menambah devisa negara serta menambah penerimaan pajak dan retribusi.

Studi empiris yang dilakukan Pitana dan Diarta (2009) dalam Saputro (2015) suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut, maka pengeluaran untuk membeli berbagai keperluan selama liburan akan berdampak pada ekonomi daerah tersebut. Dampak tersebut antara lain:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa negara
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap harga-harga

- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lama wisatawan tinggal di tempat wisata (hotel/penginapan) maka semakin banyak pula pengeluaran wisatawan untuk membayar hotel/penginapan, untuk makan, minum dan keperluan yang lain. Semakin banyak keperluan pengeluaran wisatawan di daerah wisata maka akan meningkatkan peluang dalam menambah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah wisata tersebut. Oleh karena itu jumlah Pendapatan Asli Daerah Magetan akan terus meningkat jika jumlah wisatawan semakin bertambah dalam setiap harinya.

b. Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 yang dimaksud pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dan dipungut bayaran disebut sebagai restoran. Rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering juga disebut sebagai restoran (Siahaan, 2009:327).

Konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran disebut sebagai subyek pajak, sedangkan yang menjadi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (Candrasari & Ngumar, Februari 2016). Pelayanan yang disediakan oleh restoran dapat dikatakan sebagai objek pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut Candrasari dan Ngumar (Februari 2016), rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya adalah termasuk kedalam kategori objek pajak restoran.

Menurut PP 1 Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran untuk mengukur tingkat potensi, efektivitas dan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1) Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Potensi adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan, digali dan dikembangkan dari kemampuan diri seseorang atau hal lain (Prakoso, 2005:42 dalam Candrasari & Ngumar, Februari 2016). Cara mengetahui Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan menggunakan rumus:

$$Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

2) Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Menurut Mahmudi (2010) Pajak Hotel dan Restoran dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Menurut Memah (2013) dalam (Candrasari & Ngumar, Februari 2016) untuk mengukur besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran:

Tingkat Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}}{\text{Target Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}} \times 100\%$$

3) Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD (Candrasari & Ngumar, Februari 2016). Jika hasil perbandingan semakin besar maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010). Untuk mengukur kontribusi pajak hotel dan restoran menurut Memah (2013) yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}}{\text{Target Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}} \times 100\%$$

Menurut Fuad Bawasir (1999:103) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Presentase antara 0%-0,9% artinya relatif tidak mempunyai kontribusi

- b) Presentase antara 1%-1,9% artinya kurang mempunyai kontribusi
- c) Presentase antara 2%-2,9% artinya cukup mempunyai kontribusi
- d) Presentase 3%-3,9% artinya mempunyai kontribusi
- e) Persentase > 4% artinya sangat mempunyai kontribusi

Dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa semakin tinggi penerimaan pajak restoran dapat berpengaruh pula terhadap naiknya Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah daerah.

c. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha di suatu wilayah selama periode tertentu (Kusumaningsih, 2012). Untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu diperoleh melalui Pendapatan perkapita dan dihitung dengan Pendapatan Daerah Domestik Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah (Qadarrochman, 2010). Sedangkan pengertian PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan

output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu (PDRB Kabupaten Magetan Menurut Lapangan Usaha 2010-2014).

Orang-orang yang melakukan perjalanan wisata pada umumnya adalah yang memiliki waktu luang (libur) dan memiliki pendapatan yang relatif tinggi, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk pergi ke tempat wisata. Ketika pendapatan perkapita masyarakat tinggi maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata, yang akhirnya berdampak positif bagi daerah yaitu dengan naiknya pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Magetan.

4. Permintaan dan Penawaran Pariwisata

a. Permintaan Pariwisata

Menurut Spillane (2001:103) dalam Supriyanto (2010), mobilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pariwisata. Mobilitas manusia akan muncul saat terjadi dorongan kebutuhan atau kepentingan yang disebut dengan istilah motivasi, kemudian digolongkan sebagai berikut :

- 1) Dorongan kebutuhan dagang atau ekonomi;
- 2) Dorongan kebutuhan kepentingan politik;
- 3) Dorongan kebutuhan keamanan;
- 4) Dorongan kebutuhan kesehatan;
- 5) Dorongan kebutuhan pemukiman;
- 6) Dorongan kebutuhan kepentingan keagamaan;

- 7) Dorongan kebutuhan kepentingan pendidikan/studi;
- 8) Dorongan kebutuhan minat kebudayaan;
- 9) Dorongan kebutuhan hubungan keluarga;
- 10) Dorongan kebutuhan untuk rekreasi (dalam arti luas);

Dari dorongan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut munculah permintaan dari sektor pariwisata misalnya, pemandangan yang indah, udara yang sejuk, tempat wisata yang bersih, fasilitas yang memadai saat menuju tempat wisata dan sebagainya. Ada dua permintaan yaitu permintaan potensial dan permintaan nyata. Permintaan potensial adalah permintaan sejumlah orang yang memenuhi anasir pokok suatu perjalanan oleh karena itu mereka siap untuk bepergian, sedangkan permintaan nyata yaitu sejumlah orang yang secara nyata pergi ke tempat wisata (Gromang, 2003:a32) dalam (Supriyanto, 2010).

Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pariwisata yaitu tingkat pendapatan, perubahan harga, dan sosial budaya. Ketika seseorang memperoleh pendapatan yang tinggi, artinya mempunyai uang lebih maka mereka akan merencanakan untuk pergi ke tempat wisata. Begitu pula dengan perubahan harga, perubahan harga akan mempengaruhi seseorang dalam menggunakan dana yang dimiliki ketika berada di tempat wisata. Jika harga-harga yang ditawarkan di tempat wisata mahal, maka mereka akan menunda untuk pergi wisata. Sedangkan sosial budaya yang menjadi ciri khas unik di

daerah wisata menjadikan wisatawan ingin melihat dan menggali ilmu dari daerah tersebut untuk dipelajari, hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap kunjungan wisata. Selain pendapatan, perubahan harga, dan sosial budaya yang dapat mempengaruhi permintaan pariwisata, hari libur juga berpengaruh positif terhadap permintaan pariwisata.

b. Penawaran Pariwisata

Peran sektor pariwisata yang merubah penerimaan daerah serta pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi lebih tinggi membuat setiap negara berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi wisata yang berada di daerah atau negaranya. Dengan begitu setiap negara harus mempersiapkan apa yang menjadi andalan dan apa yang ditawarkan dari obyek-obyek wisata yang dimiliki setiap negara tersebut, sehingga memadai dengan permintaan pariwisata.

Penawaran pariwisata yang disediakan oleh pemerintah bergerak dalam bidang industri jasa, karena industri pariwisata berorientasi pada penjualan jasa atau bidang padat karya yang akan membutuhkan banyak orang untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dengan kata lain akan membuka banyak lapangan pekerjaan yang akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai contoh Bali, yang merupakan daerah wisata yang perkembangannya cukup pesat sehingga sektor

pariwisata dapat membuka lapangan kerja sepertiga dari penduduknya yang berjumlah 3,5 juta orang (Supriyanto, 2010).

Menurut Spillane (1987) dalam Qadarochman (2010), penawaran pariwisata dapat dibagi menjadi:

1) Proses produksi industri pariwisata

Sebagai industri pariwisata majunya perkembangan pariwisata dapat diperoleh dari bermacam-macam usaha antara lain :

- (a) Promosi untuk memperkenalkan obyek wisata;
- (b) Transportasi yang lancar;
- (c) Keimigrasian atau birokrasi;
- (d) Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman;
- (e) Pemandu wisata yang cakap;
- (f) Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar;
- (g) Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik;

2) Penyediaan lapangan kerja

Perkembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini juga akan menarik pendatang-pendatang baru dari luar daerah agar bisa bekerja di daerah wisata tersebut.

3) Penyediaan infrastruktur

Industri pariwisata memerlukan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan dan bandara agar akses menuju tempat wisata menjadi mudah. Dengan bangunan fisik yang memadai diharapkan para wisatawan dari luar daerah atau luar negeri merasa nyaman saat melakukan perjalanan ke tempat wisata, sehingga penyediaan infrastruktur ikut mendukung pengembangan pariwisata.

4) Penawaran jasa keuangan

Yang dapat ditawarkan kepada wisatawan selain obyek-obyek wisata yang menarik, sosial budaya tradisional dari suatu masyarakat juga menjadi daya tarik wisatawan. Seperti kebiasannya (adat istiadat) daerah setempat yang semuanya merupakan unsur yang memiliki daya tarik bagi wisatawan saat berkunjung ke suatu daerah.

5. Dampak Pariwisata

Dampak pariwisata dapat dirasakan oleh wisatawan, masyarakat daerah wisata serta masyarakat di luar daerah wisata dan pemerintah daerah. Bagi wisatawan yang berkunjung, mereka akan memperoleh manfaat dari tempat wisata yang mereka kunjungi, seperti dapat menikmati pemandangan yang indah dengan udara yang segar, memperoleh pelayanan yang ramah ketika berada di tempat wisata maupun di hotel, dan sebagainya. Sedangkan dampak pariwisata bagi

masyarakat setempat, mereka akan memperoleh pekerjaan dengan bekerja sebagai pedagang, tukang parkir, tour guide, membangun hotel, restoran dan sebagainya. Jika obyek-obyek wisata semakin banyak pengunjung, pemerintah juga akan merasakan dampaknya yaitu, penerimaan daerah akan meningkat, terlebih jika ada wisatawan asing yang berkunjung neraca pembayaran pun akan bertambah karena wisatawan akan membelanjakan uang mereka di negara yang dikunjunginya, sehingga yang terjadi pemasukan akan lebih besar dari pengeluaran.

Penerimaan daerah akan diperoleh dari pajak daerah dan bukan pajak daerah lainnya. Kontribusi yang diberikan sektor pariwisata untuk daerah melalui pajak daerah, laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta pendapatan lain-lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Kontribusi pajak daerah dari sektor pariwisata diperoleh melalui pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak minuman beralkohol ,pajak reklame serta pajak pemanfaatan air bawah tanah (Qadarrochman, 2010). Menurut Spillane (1987) dalam Qadarrochman (2010), adanya dampak berganda (*multiplier effect*) juga akan mempengaruhi naiknya pendapatan dan pemerataan masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui belanja wisatawan di daerah tujuan wisata, dengan menjual barang dan jasa seperti hotel, restoran, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan

demikian pariwisata dijadikan alternatif untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah tujuan wisata.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kerangka acuan dari penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan acuan untuk membantu penulis dalam melakukan penyusunan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Nasrul Qadarochman (2010); Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.

Studi empiris yang dilakukan oleh Qadarochman (2010) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan menganalisis faktor apa yang paling berpengaruh dari variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah Kota Semarang.

Dengan menggunakan metode regresi linier berganda hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan. Dan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang yaitu variabel jumlah obyek wisata.

2. Widya Karisma (2011); Analisis Peran Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

Tujuan dari penelitian Karisma (2011) yaitu untuk menganalisis kontribusi industri pariwisata yang terdiri dari retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah wisatawan manca negara terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan kesimpulan dalam penelitian Karisma (2011) bahwa industri pariwisata yang terdiri dari retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah wisatawan manca negara berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Dan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu variabel retribusi obyek wisata.

3. Ni Luh Gde Ana Pertiwi (2014); Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar

Tujuan dari penelitian Pertiwi, N.L (2014) yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan hasil analisis penelitian Pertiwi, N. L.

(2014) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar pada Tahun 1993 -2012.

3. Yuni Wahyuni (2015); Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam penelitian dahulu oleh Wahyuni (2015), penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di DIY. Berdasarkan hasil uji regresi data panel diperoleh hasil penelitian bahwa jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata berpengaruh signifikan sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Eko Saputro (2015); Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Sekabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.

Dalam penelitian Saputro (2015) menggunakan variabel jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, investasi di industri pariwisata dan jumlah obyek wisata untuk menganalisis pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian Saputro yaitu menggunakan regresi linier berganda dengan kesimpulan bahwa jumlah wisatawan dan pendapatan

perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata sedangkan investasi di industri pariwisata dan jumlah obyek wisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah.

5. Aszalika Raisya Pertiwi (2016) ; Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian Pertiwi (2016) bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap PAD di Kabupaten Jepara. Dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) hasil penelitian ini adalah dalam jangka pendek PDRB, jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jepara, sedangkan dalam jangka panjang PDRB, jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Jepara.

6. Putri Tanjung Sari (2016); Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung. Metode yang digunakan OLS (Ordinary Least Square) dan regresi linear berganda dengan variabel yang digunakan yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel dan jumlah restoran

dan rumah makan. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa jumlah obyek wisata dan jumlah wisatawan memiliki koefisien positif dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata, jumlah kamar hotel memiliki koefisien positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata dan jumlah restoran memiliki koefisien negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata dengan angka probabilitas dibawah 0,05 pada tingkat alfa 5%.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	<p>Qadarrochman, Nasrul (2010)</p> <p>Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya</p>	<p>Dependen: Penerimaan Daerah sektor pariwisata</p> <p>Independen: Jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang dengan nilai t-hitung sebesar 4,407 dan probabilitas signifikan sebesar 0,001</p>
2	<p>Karisma, Widya (2011)</p> <p>Analisis Peran Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo</p>	<p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Independen: retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah wisatawan mancanegara</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo</p>
3	<p>Pertiwi, Ni Luh Gde Ana (2014)</p> <p>Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar</p>	<p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Independen: Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Semua variabel independen yaitu jumlah wisatawan, pajak hotel dan restoran, pendapatan retribusi obyek wisata, berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 1993 - 2012</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
4	<p>Wahyuni, Yuni (2015)</p> <p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014</p>	<p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata</p> <p>Independen: Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita</p>	Data Panel	<p>Jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata berpengaruh signifikan sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
5	<p>Saputro, Eko (2015)</p> <p>Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Sekabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya</p>	<p>Dependen: Penerimaan daerah sektor pariwisata</p> <p>Independen: Jumlah wisatawan, PDRB, Investasi, jumlah obyek wisata</p>	Regresi Linear Berganda	<p>Jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata sedangkan investasi di industri pariwisata dan jumlah obyek wisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
6	<p>Pertiwi, Aszalika Raisya (2016)</p> <p>Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara</p>	<p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Independen: PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel</p>	<p>Vector Error Correction Model (VECM)</p>	<p>Dalam jangka pendek PDRB, jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jepara, sedangkan dalam jangka panjang PDRB, jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jepara</p>
7	<p>Sari, Putri Tanjung (2016)</p> <p>Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung</p>	<p>Dependen: Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata</p> <p>Independen: Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan</p>	<p>OLS (Ordinary Least Square) dan Regresi Linear Berganda</p>	<p>Jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan jumlah restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata, jumlah kamar hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata sektor pariwisata di Kabupaten Belitung.</p>

Perbedaan penelitian Penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada metode yang Penulis gunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian sebelumnya metode yang digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda yang dilakukan oleh Qadarrochman (2010), Karisma (2011), Pertiwi N. L. (2014) Saputro (2015) dan Sari (2016). Metode Data Panel dilakukan oleh Wahyuni (2015) dan metode Vector Error Correction Model (VECM) dilakukan oleh Pertiwi (2016) sedangkan dalam penelitian Penulis menggunakan metode *Error correction Model (ECM)*.

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya mengambil studi kasus di Kota Semarang (Qadarrochman, 2010), di Kabupaten Wonosobo (Karisma, 2011), di Kabupaten Gianyar (Pertiwi N. L., 2014) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Wahyuni, 2015), di kota/sekabupaten Jawa Tengah (Saputro, 2015), di Jepara (Pertiwi, 2016) dan di Kabupaten Belitung (Sari, 2016). Sedangkan dalam penelitian Penulis menggunakan studi kasus di Kabupaten Magetan pada tahun 2013:01-2016:12.

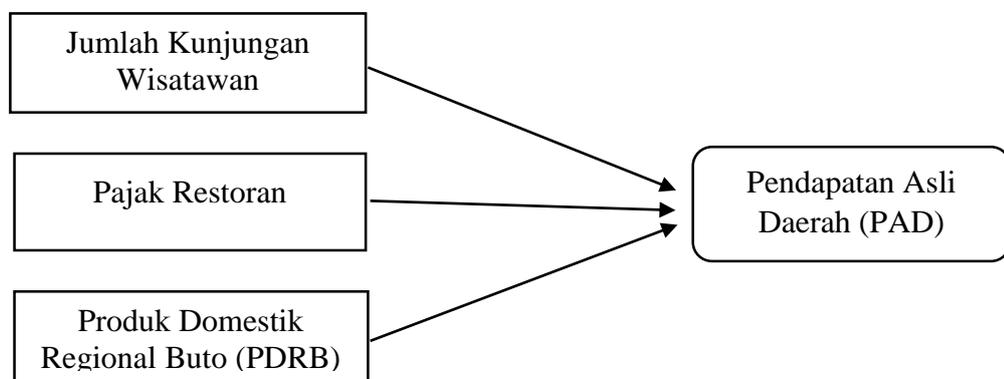
C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Magetan pada tahun 2013:01-2016:12.
2. Variabel Pajak Restoran diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Magetan tahun 2013:01-2016:12.
3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Magetan tahun 2013:01-2016:12.

D. Model Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian “Analisis yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Magetan” antara lain variabel jumlah wisatawan, variabel pajak restoran dan variabel Produk Domestik Regional Bruto. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran